

**NOTULEN RAPAT KOORDINASI FLLAJ JANUARI 2021**  
**FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**Selasa, 19 Januari 2021**

---

---

1. Rapat dilaksanakan pada hari Selasa pukul 09.00 WITA yang bertempat di Ruang Rapat Laboratorium Rujukan Nasional Dinas Perhubungan Provinsi NTB;
2. Rapat dibuka oleh Ketua FLLAJ NTB, Drs. Lalu Bayu Windya, M.Si. dengan membacakan agenda rapat terkait pohon tumbang yang kian sering terjadi tanpa adanya perhatian khusus dari beberapa instansi terkait. Selain pohon tumbang, masalah terkait tanah longsor di beberapa daerah rawan seperti Nangga-tumpu dan Sembalun dan angkutan umum barang seperti dump truck di NTB yang dapat dikatakan sebagai mesin pembunuh yang tidak dapat dihindari akibat beberapa faktor diantaranya perilaku supir yang menyepelekan batas kecepatan maksimum akibat kebiasaan ataupun tuntutan "Kejar setoran" dari proyek. Ketua FLLAJ NTB menyampaikan beberapa solusi dari masalah longsor yang sering terjadi yakni berupa penanaman dan penghijauan dengan tanaman khusus biasanya yang sering ditemui di beberapa hill di beberapa titik. Dari hasil pemantauan Ketua FLLAJ NTB pohon yang sering tumbang di NTB adalah pohon terong besi akibat terlalu rindang dan akar yang rapuh terlebih lagi ketika musim hujan sehingga cabang batang atas (Kanopi) terlalu banyak menyimpan air dan terlampau berat, penyebab lain pohon tersebut sering tumbang adalah batang dan akar yang keropos akibat usia. Adapun solusi yang ditawarkan berupa pemangkasan daun dan batang yang terlampau berat. Ditengah keterbatasan anggaran yang sedang terjadi akibat adanya pandemi virus corona yang merebak cukup tinggi di NTB menjadikan permasalahan yang cukup urgen untuk di bahas pula;
3. Ketua Pokja FLLAJ, I Wayan Suteja, S.T., M.T. menyampaikan Terkait longsor berdasarkan peta dari peninjauan terakhir pada tahun 2017 diantaranya daerah nangga-tumpu yang menjadi klasifikasi daerah rawan longsor dan rawan kecelakaan. Beberapa solusi adalah dibutuhkan kajian dari sudut PU secara teknis terutama KM-117 di daerah tebing rawan longsing diseraai jalan tikungan Nangga-Tumpu maka dibutuhkan investigasi persyaratan daerah milik jalan dan pengawasan dan perencanaan jalan harus dilaksanakan dengan threatmen seperti menggunakan tanggul untuk memperkuat struktur tebing. Adapun permasalahan pohon tumbang sesuai pelaksanaan teknis jalan pada ruang milik jalan seharusnya hanya ada utilitas jalan ataupun non utilitas jalan seperti RPPJ namun penghijauan (pohon) sekarang terdapat di Utilitas jalan yang cukup mendominasi daripada fasilitas yang seharusnya wajib saja. Adapaun Dinas terkait telah cukup banyak melakukan penebangan sebelum musim hujan namun belum adanya kajian terkait pohon mana saja

yang berumur tua dan rapuh berdampak tumbang nantinya. Harus dikembalikan ke lintas sektor (FLLAJ) diharapkan akan membuat komunikasi lintas sektor dapat berjalan dengan baik. Terkait masalah angkutan material dump truck maupun kendaraan ekspedisi tidak diperbolehkan beroperasi pada siang hari sesuai pada perundang-undangan berlaku, sehingga pengawasan dari Kepolisian perlu ditingkatkan lagi;

4. Bapak Saptono T., Terkait pohon tumbang memaparkan solusi berupa alat "Sonic Tomographyfi" untuk identifikasi pohon-pohon yang berpotensi lapuk dan akan tumbang dari IPB. Mengenai permasalahan tanah longsor menawarkan solusi penggunaan pohon beringin untuk ditanamkan di bantaran sungai dan daerah rawan longsong karena daya serap air yang cukup tinggi;
5. Bapak Murshal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB menjelaskan substansi terkait penebanagan dan pemangkasan pohon di dalam maupun luar kawasan hutan Sesuai uu nomor 18 Tahun 2013 sebagai acuan terdapat beberapa masalah seperti kayu hasil penebangan merupakan hasil pencurian (Illegal) sehingga perlu di lakukan tindakan hukum. Perihal pohon yang berada di pinggir jalan terkait keselamatan pengguna jalan makan Dinas LHK melakukan indentikasi pohon-pohon yang rawan tumbang namun hasil kayu penebang tidak boleh dipindahkan diluar konservasi tempat pohon tersebut bernaung. Dinas LHK merekomendasikan lebih ke tindakan memangkas pohon terlebih dahulu agar tidak terjadi pelanggaran hukum terhadap pohon yang dibawa keluar konservasi;
6. Ibu AKP. Rusiah Ditlantas Polda NTB meminta adanya sistim regulasi berupa patroli untuk meningkatkan tata kota yang lebih baik dan mengantisipasi tindakan di luar hukum seperti pebabatan pohon tidak seseuai dengan hukum dan memastikan izin dari penebangan pohon tersebut. Adapun persoalan terkait longsor yang sering terjadi menawarkan solusi untuk memperluas jarak antar jalan yang dilalui pengendara dengan jarak tebing yang dikhawatirkan akan mengalami longsor;
7. Bapak Wahyu Jasa Raharja memaparkan keadaan dump truk yang membawa material dan tidak memakai penutup bak menjadikan salah satu penyebab kecelakaan di jalan. Terkait pohon tumbang adapun solusi yang ditawarkan menggunakan alat speed gun yang dapat mengukur kecepatan kendaraan yang sedang melaju di jalan untuk dapat di verifikasi kendaraannya. Berdasarkan regulasi dari JasaRaharja menjelaskan penjaminan santunan yang diberikan adalah kepada korban pengendara umum akibat pohon tumbang tidak tercover terhadap kasus tersebut;
8. Bapak Zainuddin DPUPR NTB memaparkan beberapa pohon yang berada di RUMIJA di jalan pejanggik, pendidikan dan langko (Jalan Provinsi) merupakan kewenangan PU Provinsi NTB;

9. Bapak L.M Bakhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, menjelaskan perubahan regulasi penebangan pohon yang semula berada di bawah Dinas Perkim kini menjadi di dinas Lingkungan Hidup, sesuai nomenklatur baru yang berlaku;
10. Imam Bintang Ikram Dinas Perhubungan Kota Mataram menawarkan solusi pengawasan Odol karena pengawasan sebelumnya telah mengalami penghentian akibat pandemi covid-19 dan perlu di lakukan perancangan rute angkutan barang agar jalan yang seharusnya tidak harus dilewati menjadi dilewati jalan yang berkapasitas tidak seharusnya;

**DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI JANUARI 2021**  
**FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**Selasa, 19 Januari 2021**

---

